

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR

M. Wahyuddin Abdullah*)
Siti Hardiyanti Nur*)

***Abstract :** The purpose of this study was to: 1) To determine the effect of human resources to the reliability of financial reporting of local government, 2) To determine the effect of the use of information technology to the reliability of financial reporting of local government, 3) To determine the influence of the internal control system of the reliability of financial reporting of local government , 4) To determine the effect of the application of the accrual basis to the reliability of financial reporting of local government. The author uses a quantitative approach to address these problems using primary data in the form of a questionnaire distributed to all respondents. Respondents in this study is the head SKPD, Head of Finance and Staff Division of Accounting / Finance Administration throughout SKPD contained in Takalar. The number of questionnaires issued in this study were 50 pieces of questionnaires sent to 35 SKPD in Takalar. But after going through the questionnaire collection phase, was only obtained 46 respondents who returned. Data used in this research is primary data obtained from the respondents on the questionnaire that was sent directly to each SKPD. Before analyzing the data, researchers to test the validity and reliability of the 30 respondents to indicate the extent to which the questionnaire can be trusted and relied upon. The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis techniques. Results of testing the hypothesis in this study indicate that human resource capacity and utilization of information technology does not affect the reliability of financial reporting of local government. However, the internal control system and the implementation of accrual based in this study significantly affect the reliability of financial reporting local government.*

***Keywords:** Human Resources, Information Technology, Internal Control, the Accrual Basis, the Reliability of Financial Reporting*

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan

keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai Mustafa (Sari dan Witono, 2014).

Sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan persaingan organisasi. Suatu sistem informasi akan bisa dijalankan apabila terdapat sumber daya manusia sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang cukup agar mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik. Amran (2009) menyatakan bahwa

sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. Sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitasnya juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan.

Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu Mirnayanti (Roshanti dkk,2014).

Selain itu hal lain yang juga berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan yaitu penerapan PP NO.71 tentang standar akuntansi berbasis akrual. Sebagaimana diketahui bahwa akuntansi berbasis akrual sangat berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan karena dapat memberikan informasi yang lebih transparan sehingga didapatkan keterandalan dalam pelaporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, yaitu menggunakan basis kas menuju akrual. Basis akrual mengharuskan penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dan sistem pengendalian internal dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut (Kusuma, 2013).

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Mardiasmo (Arfianti, 2011:32) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Safitri, masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *selfinterest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan

bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Arfianti, 2011: 32-33).

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu kelompok dan organisasi (Nurina, 2010). Motivasi yang dimiliki seseorang sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Teori kepatuhan (*Compliance theory*) dikembangkan oleh Milgram pada tahun 1963. Menurut Milgram (1963), kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Milgram pada tahun 1963, salah satu dari beberapa eksperimen psikologi terkenal pada abad 20. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada. Sehingga kepatuhan diartikan sebagai perilaku mengikuti permintaan otoritas meskipun individu secara personal individu tidak

setuju dengan permintaan tersebut (Tondok dkk, 2012).

Technology to Performance Chain (TPC)

Technology to Performance Chain (TPC) merupakan sebuah model yang mana peran penting teknologi berpengaruh terhadap kinerja pada tingkat individual. Inti dari model ini adalah agar teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai maka teknologi tersebut harus dimanfaatkan dan teknologi tersebut harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pengaruh TTF ke pemakaian (*utilization*) terlihat lewat kepercayaan dari konsekuensi-konsekuensi harapan pemakaian (*expected consequences of utilization*). Faktor-faktor lain yang memengaruhi pemakaian (*utilization*) adalah perasaan mengarah ke penggunaan (*affect toward using*), norma-norma sosial (*social norms*), kebiasaan (*habit*) dan kondisi-kondisi pemfasilitasi (*fasilitating conditions*). Umpan balik (*feedback*) merupakan aspek yang penting dari model.

Sumber Daya Manusia

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcome*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Andono (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi

jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari nilai informasi yang dihasilkan. Dengan bantuan komputer pengolahan data bisa diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih di bawah manfaat itu sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengatur pengolahan data sehingga manfaat ekonomis sebuah informasi dapat diperoleh secara maksimal (Winingdyaningrum dan Rahmawati, 2010:10). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan berbasis akrual

Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan SAP tersebut. Oleh karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerapan SAP berbasis akrual (Faradillah, 2013:23-30). Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Kusuma, 2013:74).

Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan

material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional merupakan hasil dari proses perikayasaan akuntansi. Pelaporan keuangan memiliki tujuan yang bersifat fungsional. Tujuan fungsional pelaporan keuangan adalah masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi dari masing-masing individu didalamnya. Tujuan individu tidak dapat diamati sedangkan tujuan fungsional dapat diidentifikasi dengan mengamati konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan masyarakat yang nyata terjadi.

Pengembangan Hipotesis

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggarnya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan. Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai, memiliki pengalaman kerja dibidang akuntansi dan telah mengikuti pelatihan-pelatihan akuntansi. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono dan Andono (2004). Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga bahwa terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan keterandalan pelaporan keuangan

pemerintah daerah, maka hipotesis yang penulis ajukan:

H₁ : Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah daerah.

Perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong manajemen (Mulyadi: dalam Darwanis dan Mahyani, 2009). Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan laporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c)

kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan berikut.

H₃: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi (Dora, 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut maka didapatkanlah hipotesis sebagai berikut:

H₄: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada seluruh SKPD Kabupaten Takalar. Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala SKPD, kepala bagian, dan staff bagian akuntansi. Penelitian dilakukan secara sensus yaitu semua anggota populasi dijadikan responden. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan pemilihan sampel berdasarkan

pertimbangan (*purposive/judgment sampling*), merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek (*self-report data*). Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui survei kuisisioner yang diberikan kepada responden yang ada pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Takalar. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer (*primary data*) yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak media perantara). Data dikumpulkan langsung dari objek penelitian dengan mekanisme menggunakan kuisisioner yang memuat pernyataan berkelompok berdasarkan pengukuran variable masing-masing.

Metode analisis untuk menguji uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis sebelumnya ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Keterandalan Laporan Keuangan

α : Konstanta

β_{1-4} : Koefisien regresi

X_1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia

X_2 : Pemanfaatan Teknologi Infomasi

X_3 : Sistem Pengendalian Internal

X_4 : Penerapan Berbasis Akrual

e : *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi tiap-tiap variabel independen dan satu variabel dependen dapat ditunjukkan pada hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--|----|---------|---------|---------|----------------|
| Kapasitas Sumber Daya Manusia: KSDM (X1) | 46 | 30 | 40 | 33.8478 | 2.28003 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi: PTI (X2) | 46 | 17 | 25 | 20.4783 | 1.76054 |
| Sistem Pengendalian Internal: SPI (X3) | 46 | 26 | 35 | 29.4565 | 2.04077 |
| Penerapan Berbasis Akrua: PBA (X4) | 46 | 15 | 25 | 20.8478 | 1.84953 |
| Kualitas Pelaporan Keuangan PEMDA : KPKP (Y) | 46 | 18 | 30 | 25.0435 | 2.56434 |

Sumber : Data primer, diolah 2015

Tabel diatas menunjukkan nilai rerata tertinggi berada pada variabel kapasitas sumber daya manusia sebesar 33,84, dan nilai rerata variabel tersebut mempunyai kecenderungan nilai minimum sebesar 30. Kepersepsian terhadap variabel kapasitas sumber daya manusia lebih besar dibandingkan dengan empat variabel lain, namun mempunyai kecenderungan yang rendah atas kapasitas sumber daya manusia tersebut. Urutan nilai besaran rerata berikutnya ditempati variabel sistem pengendalian internal, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, penerapan berbasis akrua, pemanfaat sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi. Nilai rerata variabel pemanfaatan teknologi informasi (17) dan variabel sistem pengendalian internal (26) cenderung mendekati nilai minimum, menunjukkan masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pada penyajian laporan keuangan. Nilai rerata variabel

penerapan berbasis akrua (15) dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (18) cenderung mendekati nilai maximum, menunjukkan responden sudah memahami penerapan berbasis akrua dalam penyajian laporan keuangan, sehingga kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah mulai menunjukkan peningkatan.

Uji Hipotesis dan Pembahasan

Hasil uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan penerapan berbasis akrua terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian tersebut ditampilkan dalam tabel-tabel berikut:

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 2
Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .805 ^a | .648 | .614 | 1.59402 |

a. Predictors: (Constant), KSDM, PTI, SPI, PBA

b. Dependent Variable: KPKP

Sumber: Data primer, diolah 2015

Tabel di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,614 (61,4%). Hal ini menunjukkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah mampu dijelaskan oleh keempat variable: kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan penerapan berbasis akrual sebesar 61,4%. Sisanya sebesar 38,6% (100% - 61,4%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Nilai Hitung F

Uji statistik menunjukkan bahwa nilai hitung F sebesar 18,865 dengan

tingkat signifikansi 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$ (5%). Hasil tersebut menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan penerapan berbasis akrual secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, model penelitian ini dapat dilanjutkan pada uji parsial atau per item variabel. Uji simultan penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 3
Nilai Hitung F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 191.736 | 4 | 47.934 | 18.865 | .000 ^b |
| | Residual | 104.177 | 41 | 2.541 | | |
| | Total | 295.913 | 45 | | | |

a. Dependent Variable: KPKP

b. Predictors: (Constant), KSDM, PTI, SPI, PBA

Sumber: data primer diolah, 2015

Nilai Hitung t

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel kapasitas sumber daya manusia (H₁), pemanfaatan teknologi informasi (H₂), sistem pengendalian internal (H₃) dan penerapan berbasis

akrual (H₄), berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Besaran nilai hitung t ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 4
Nilai Hitung t

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -5.830 | 4.072 | | -1.432 | .160 |
| | KSDM | -.014 | .154 | -.012 | -.091 | .928 |
| | PTI | -.048 | .197 | -.033 | -.245 | .808 |
| | SPI | .662 | .154 | .527 | 4.287 | .000 |
| | PBA | .616 | .159 | .444 | 3.882 | .000 |

a. Dependent Variable: KPKP

Sumber : data primer, diolah 2015.

Hasil uji statistik nilai hitung t untuk menjelaskan setiap variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini diformulasikan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = -5,830 - 0,014KSDM - 0,048PTI + 0,662SPI + 0,616PBA + e$$

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Hasil uji pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan memiliki nilai probabilitas 0,928 (92,8%) lebih besar dari taraf $\alpha = 0,05$ (5%). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah (H_1 ditolak). Latar belakang pendidikan responden tidak sepenuhnya mendukung pemahaman mereka tentang laporan keuangan pemerintah daerah.

Persepsi responden terhadap keterandalan laporan keuangan sudah cenderung lebih baik, namun belum bisa menjamin bahwa kapasitas sumber daya manusia mampu memberikan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sembiring (2013) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sumber daya yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas, dan deskripsi jabatan.

Tidak didukungnya H_1 ini sesuai dengan hasil penelitian Rosalin (2011) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada analisis deskriptif bagian data responden

yang menunjukkan bahwa masih kurangnya staf atau pegawai pelaporan keuangan di instansi pemerintahan kabupaten takalar yang berlatar belakang keilmuan akuntansi, dan sebagian besar responden hanya pernah sekali saja mengikuti pelatihan sekali mengikuti pelatihan pelaporan keuangan.

Kemampuan pegawai merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya guna mencapai suatu tujuan (Lismawati, 2014). Pegawai SKPD bagian keuangan dengan kinerja yang baik pasti akan mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya agar dapat menghasilkan output yang berkualitas, yaitu suatu laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Salah satu karakteristik dari pelaporan keuangan yang berkualitas adalah nilai informasi dalam laporan keuangan tersebut andal, yaitu informasi yang disajikan valid. Jika pegawai SKPD memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya, maka diharapkan akan menghasilkan output yang baik yaitu terciptanya keterandalan dari laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Hasil uji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan memiliki nilai probabilitas 0,808 (80,8%) lebih besar dari taraf $\alpha = 0,05$ (5%). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah (H_2 ditolak). Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sembiring (2013) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, juga bertentangan dengan penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menemukan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Data menunjukkan bahwa SKPD kabupaten Takalar memang sudah menyediakan komputer untuk para pegawainya, namun pemanfaatan teknologi informasi dan penempatan penggunaannya/staf masih kurang tepat atau tidak sesuai dengan kemampuan pengguna komputer tersebut. Selain itu, adanya penggunaan program yang tidak sesuai dalam mengolah data karena keterbatasan waktu dan biaya, dan kurangnya staf keuangan yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi.

Hasil penelitian ini dijelaskan oleh teori *Technology to Performance Chain (TPC)* yang merupakan sebuah model peran penting teknologi berpengaruh terhadap kinerja pada tingkat individual. Teknologi informasi dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan maka teknologi tersebut harus dimanfaatkan dan teknologi tersebut harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Karakteristik (pelatihan, pengalaman komputer, dan motivasi) akan memengaruhi kemudahan dan kualitas menggunakan teknologinya (Hartono, 2007). Penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan pengalamannya serta adanya keterbatasan program yang digunakan maka teknologi tersebut tidak akan dapat memberikan manfaat yang baik.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Jurnal dan Supomo (2002) bahwa kesesuaian tugas teknologi dan pemanfaatan teknologi berdampak positif terhadap kinerja, namun pemanfaatan teknologi sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja individual. Temuan yang sama penelitian Mirnayati (2013) bahwa pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik terutama pada Kabupaten Majene belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Kabupaten Majene untuk mengelola teknologi informasi dalam proses akuntansi khususnya dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi yang canggih sekalipun tidak mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan tepat waktu tanpa didukung sumber daya manusia yang berkesesuaian dengan kebutuhan penggunaannya.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Hasil uji pengaruh pengaruh pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan memiliki nilai probabilitas 0,000 (0%) lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$ (5%). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah (H_3 diterima). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran sistem pengendalian internal sangat mendukung mewujudkan terciptanya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sembiring (2013) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga mendukung temuan Husna (2013) bahwa terdapat pengaruh pengendalian intern secara positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Sukirman dkk (2013) mengemukakan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk mengawasi dan mengendalikan organisasi guna mencapai tujuan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang

dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern dibangun untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin baik pengendalian intern suatu organisasi maka semakin kecil kemungkinan kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, pengendalian intern yang semakin baik akan menjamin kekayaan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dengan demikian, pengendalian intern yang baik akan memberikan nilai informasi pelaporan keuangan yang baik pula. Sebagian besar responden penelitian ini sepakat bahwa setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Untuk meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah maka sistem pengendalian internal instansi pemerintahan juga harus lebih ditingkatkan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual terhadap keterandalan Pelaporan Keuangan

Hasil uji pengaruh pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap keterandalan pelaporan keuangan memiliki nilai probabilitas 0,000 (0%) lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$ (5%). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah (H_4 diterima). Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada SKPD di kabupaten Takalar maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden sepakat untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah

mempunyai keinginan dan kemauan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik dengan penggunaan SAP sebagai sarana mendukung optimalisasi bidang tugas pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan SAP yang baik berkonsekuensi terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Diawati (2015) yang menemukan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan daerah pemerintahan Kota Surakarta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melakukan ketentuan, menyelenggarakan akuntansi, dan pelaporan keuangan dengan baik sehingga mampu meningkatkan keterandalan laporan keuangan. Beberapa SKPD di kabupaten Takalar masih banyak pegawai yang belum mengerti bahkan tidak mengerti tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), namun seharusnya keterbatasan pengetahuan pegawai tentang SAP, para pegawai harus diberikan pelatihan terhadap pelaporan keuangan lebih sering lagi. Pegawai memperoleh pengetahuan yang baik tentang SAP dan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kondisi ini akan menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan bagi pemerintah daerah yang berkualitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Staf SKPD jarang mengikuti pelatihan laporan keuangan. Untuk meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan, maka yang berkompeten harus lebih sering mengikuti pelatihan. Pelatihan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan pegawai dan lingkungan sosialnya. Pemanfaatan

teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penempatan penggunaannya atau staf masih kurang tepat atau tidak sesuai dengan kemampuan dari pengguna teknologi informasi dan kurangnya staf keuangan yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi.

Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik sistem pengendalian internal di setiap SKPD di kabupaten Takalar maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan basis akrual di setiap SKPD yang terdapat di kabupaten Takalar maka akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain Standar akuntansi berbasis akrual ini dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas dibandingkan standar sebelumnya.

Saran-Saran

Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih meningkatkan penyajian laporan keuangan secara lengkap serta lebih melonggarkan akses laporan keuangan tersebut kepada publik dan meningkatkan transparansi, sehingga tercipta keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel yang berpengaruh kuat terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, latar belakang pendidikan responden tidak sepenuhnya mengerti tentang laporan keuangan. Banyak pegawai SKPD pada bagian keuangan tidak mengerti tentang

standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya lebih memperluas sampel penelitian, ataupun ketepatan pada kriteria responden.

DAFTAR PUSTAKA.

- Alimbudiono, R.S.dan F. A. Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akunansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 5(2): 18-30.
- Amran. 2009. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ichsan Gorontalo*, 4 (2): 2397-2413.
- Arfianti, D. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darwanis dan D. D. Mahyani. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & riset akuntansi*, 2(2) juli: 133-151.
- Diawati, M. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Surakarta. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Dora, Sofia.2014. Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Kasus pada BPKD Kota Medan). *Skripsi*. Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Faradillah, A. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hamzah, A. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai Terhadap MInat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Madura). *Symposium Nasional Sistem Teknologi Informasi*. UGM, Yogyakarta.
- Hartono, J. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Andi, Yogyakarta.
- Husna, F. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang). *Tesis*. Universitas Negeri Padang.
- Jensen, M.C. dan C.W. Smith.1984. *The Theory of Corporate Finance: A History Overview*. Mc Graw Hill, New York.
- Jumali, T. dan B. Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5(2): 214-222.
- Kusuma.M.I.Y, 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kusuma, R. S. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember). *Skripsi*. Universitas Jember.
- Lismawati.2014. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 4(4): 23-31.
- Milgram, S. 1963. Behavioral Study Of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 6(7):371-378.
- Mirnayanti. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nurina, L. 2010. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surakarta. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Rosalin, F. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan dan

- Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.*Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Roshanti, A., E. Sujana, dan K. Sinarwati. 2014. Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal, SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*:2(1).
- Sari, S.P. dan B. Witono. 2014. Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Research Methods and Organizational Studies*: 418-419.
- Sembiring, F. L. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang).*Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Sukirman, H. Sularso, dan E. S. Nugraheni. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dengan Pengendalian Intern Akuntansi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas).*Jurnal*, 3(1). Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Tondok, M. Sampe, F. Ardiansyah dan Ayuni. 2012. Intensi Kepatuhan Menggunakan Helm pada Pengendara Sepeda Motor: Aplikasi Teori Perilaku Terencana. *Research Gate*, Januari: 1-25.
- Winingdyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukowonosraten).*SNA XIII*, Purwokerto

***) Penulis adalah Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa
tosir_wahyu@yahoo.com**